

Editor: Susi Dian Rahayu



ISLAM DAN PEMERINTAHAN KONTEMPORER

Refleksi Akademik Kajian KURMA



Ainur Rofieq | Andi Sopandi
M. Harun Alrasyid | Muhtar Haboddin
Hartanto Rosojati

ISLAM dan **PEMERINTAHAN** **KONTEMPORER**

Refleksi Akademik Kajian KURMA

Ainur Rofieq, Andi Sopandi,
M. Harun Alrasyid, Muhtar Haboddin,
Hartanto Rosojati

PENERBIT KBM INDONESIA

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

ISLAM DAN PEMERINTAHAN KONTEMPORER

Refleksi Akademik Kajian KURMA

*Copyright @2026 By Ainur Rofieq, dkk
All right reserved*

Penulis

Ainur Rofieq, Andi Sopandi,
M. Harun Alrasyid, Muhtar Haboddin,
Hartanto Rosojati

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Sofitahm

Editor

Susi Dian Rahayu

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit.kbmindonesia

@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-278-253-8

Cetakan ke-1, Maret 2026

14,8 x 21 cm, vi + 104 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PENGANTAR EDITOR

Kurma (*Phoenix dactylifera*, L) merupakan buah yang biasa ditemui ketika bulan Ramadhan tiba. Buah yang banyak dibudidayakan di wilayah Timur Tengah dan Mediterania ini biasa dikonsumsi pada saat berbuka puasa. Kebiasaan ini tidak terlepas dari Hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, “Apabila salah seorang di antara kalian berbuka, maka berbukalah dengan kurma, sebab kurma itu mendatangkan berkah. Namun apabila tidak ada, berbukalah dengan air karena air itu bersih”. Dalam buku karya Hamid Sakti Wibowo yang berjudul “7 Buah-buahan Istimewa dalam Al-Qur’an dan Manfaatnya bagi Kesehatan Manusia” disebutkan manfaat mengonsumsi buah kurma.

Terinspirasi dari buah kurma tersebut, Laboratorium Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Islam 45 menyelenggarakan sebuah diskusi yang berjudul KURMA yang merupakan kepanjangan dari **K**ajian **B**ulan **R**amadhan **I**slam dan **P**emerintahan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan khususnya dan peserta di luar Program Studi Ilmu Pemerintahan umumnya tentang Islam dan isu-isu tentang pemerintahan dan politik yang kontekstual.

Kegiatan ini pertama kali diluncurkan pada bulan Ramadhan tahun 1443 H atau 2022 M. Tema yang diangkat cukup beragam, dari hal kepemimpinan dalam Islam, peran perempuan dalam Islam dan pemerintahan, islam dan lingkungan, serta prinsip *good governance* dalam konteks Islam. Narasumber yang dihadirkan pun beragam dari kalangan akademisi internal maupun eksternal Program Studi Ilmu Pemerintahan serta praktisi.

Pada pelaksanaan tahun 2023 M tema yang diusung terkait pendidikan politik mengingat tahun 2024 merupakan tahun politik, dimana pada tahun tersebut akan diselenggarakan pemilihan umum (pemilu). Seperti diketahui bahwa secara kuantitas pemilih pada pemilu 2024 didominasi oleh Generasi Milenial dan Generasi Z. Oleh karena itu, tema besar yang diangkat mengenai menciptakan generasi yang cerdas dalam pemilu. Narasumber yang dihadirkan berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi, serta akademisi dari Program Studi Ilmu Pemerintahan. Dan pada pelaksanaan tahun 2024 M, tema kegiatan berkaitan dengan bagaimana menyikapi hasil pemilu 2024 dalam konteks politik pemerintahan dan agama.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara demokratis yang majemuk, relasi antara Islam dan pemerintahan selalu menjadi tema yang aktual dan dinamis. Isu legitimasi kekuasaan, etika kepemimpinan, partisipasi politik, moderasi beragama, hingga tantangan demokrasi di era digital merupakan persoalan yang memerlukan pendekatan komprehensif dan reflektif. Buku ini berupaya menghadirkan perspektif teoretis sekaligus kontekstual mengenai bagaimana nilai-nilai Islam dapat

berkontribusi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang adil, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Secara sistematis, buku ini membahas landasan konseptual hubungan Islam dan negara, dinamika sistem politik Indonesia, serta isu-isu strategis pemerintahan kontemporer. Setiap bab disusun dengan pendekatan akademik yang mengedepankan argumentasi ilmiah, refleksi normatif, dan analisis kontekstual terhadap realitas sosial-politik Indonesia. Dengan demikian, buku ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumentasi kegiatan ilmiah, tetapi juga menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan pemerhati ilmu pemerintahan serta politik Islam.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga kehadiran buku ini dapat memberikan kontribusi intelektual bagi pengembangan ilmu pemerintahan, sekaligus memperkaya khazanah pemikiran Islam dalam konteks demokrasi Indonesia.

Pada akhirnya, dengan mengutip ungkapan filsuf Perancis Rene Descartes, "*cogito ergo sum*", saya berpikir maka saya ada, maka eksistensi kegiatan KURMA ini tidak akan lengkap jika tidak memiliki rekaman dalam bentuk buku. Terbitnya buku KURMA ini menunjukkan eksistensi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam 45, dengan turut memberikan sumbangsih bagi masyarakat melalui pemikiran tentang pemerintahan dan Islam.

Kepada narasumber kegiatan dan kontributor tulisan buku ini kami haturkan penghargaan yang tidak terhingga. Demikian pula kami sampaikan terima kasih kepada para peserta diskusi KURMA yang selalu setia hadir dari sejak awal kemunculannya

hingga saat ini. Tanpa kehadiran bapak/ibu/saudara dalam setiap diskusi KURMA rasanya akan terasa hampa. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyajian diskusi dan isi buku ini. Kami akan selalu berusaha mengangkat tema-tema aktual tentang pemerintahan dan Islam dalam penyelenggaraan KURMA berikutnya.

Bekasi, Maret 2025

DAFTAR ISI

PENGANTAR EDITOR.....	i
DAFTAR ISI	v

Bab 1

KINERJA MEMPERKUAT LEGITIMASI

PEMIMPIN	1
----------------	---

Mubtar Haboddin

A. Pengantar	2
B. Makna Legitimasi.....	3
C. Bentuk Legitimasi Pemerintahan	5
D. Kinerja Memperbesar Legitimasi	7
E. Kinerja Buruk, Legitimasi Menurun	12
F. Catatan Kritis	16

Bab 2

KRISIS IKLIM DAN MASA DEPAN POLITIK

INDONESIA	19
-----------------	----

Hartanto Rosojati

A. Pengantar	20
B. Komitmen Indonesia pada Kebijakan Internasional.....	21
C. Menakar Kebijakan dan Realitas Kondisi Lingkungan di Indonesia	26
D. Rekomendasi Strategis Kebijakan Politik-Sistemik ...	31

Bab 3

POTENSI KONFLIK DI DAERAH URBAN DAN STRATEGI INTEGRASI MASYARAKATNYA 41

Andi Sopandi

- A. Pendahuluan.....42
- B. Strategi dan Tipe Penyesuaian Umat Beragama.....47
- C. Pola Penyesuaian 54
- D. Kesimpulan 63

Bab 4

OPTIMALISASI MODAL SOSIAL UNTUK RESOLUSI KONFLIK 69

M. Harun Alrasyid

- A. Pendahuluan.....70
- B. Modal Sosial 74
- C. Unsur Pokok Modal Sosial.....81

Bab 5

MENGAWAL GENERASI Z, MENGAWAL DEMOKRASI 87

Ainur Rofieq

- A. Pendahuluan.....88
- B. Siapa Generasi Z? 90
- C. Bagaimana Mengawalnya? 92
- D. Catatan Penutup 95

PROFIL PENULIS DAN EDITOR 99

The background of the top half of the page is a stylized illustration. It features a large, white, domed structure, likely a mosque, with a spire on top. The dome is surrounded by palm trees and other foliage. The sky is dark with several birds flying. The overall style is a high-contrast, graphic illustration.

Bab 1

KINERJA MEMPERKUAT LEGITIMASI PEMIMPIN

■ Muhtar Haboddin



Apa yang kita pikirkan
adalah apa yang kita kerjakan
-Rhenald Kasali, 19/1/2007.

Jadilah pemimpin perkasa
Pergi meninggalkan jasa
Di kenang tak akan hilang
Untuk dilupakan orang
-Djohan Effendi, 2012

A. PENGANTAR

Legitimasi dan kinerja saling terkait dalam memahami bagaimana tatakelola pemerintahan berlangsung. Agar legitimasi pemimpin kuat dari dimensi politik, maka diperlukan kinerja yang baik dan bisa memuaskan berbagai kalangan. Kalau demikian logikanya, maka kinerja pemerintahan merupakan pondasi dalam membangun pemerintahan yang kuat dan stabil. Karena itu, kuat dan lemahnya pemimpin sangat ditentukan oleh penilaian masyarakat atas kinerjanya. Pemahaman ini senada dengan Saiful Mujani, R William Liddle, Kuskridho Ambardi (2011) yang menulis bahwa legitimasi pemimpin terletak pada penilaian warganya, yakni sejauhmana kinerjanya dinilai positif dan berdampak langsung dalam kehidupan masyarakat.

Dari sinilah asal mula mengapa persoalan kinerja sangat penting bagi stabilitas politik pemerintahan. Mengingat dalam beberapa tahun terakhir ada tren penurunan kepercayaan terhadap kinerja pemerintahan di berbagai negara (Dwiyanto,

2011). Kekalahan kelompok reformis-moderat dan terpilihnya kelompok konservatif di Iran dalam pemilihan presiden membuktikan hal ini (*Kompas*, 21/6/2021). Penjelasan yang sama juga dialami dengan kekalahan Trump dalam pemilihan Presiden terakhir di Amerika Serikat. Tulisan ini diawali dengan pemaparan definisi legitimasi dari berbagai pendapat pakar, kemudian dilanjutkan dengan bentuk-bentuk legitimasi. Penjelasan berikutnya lebih banyak membahas bagaimana pemimpin memperbesar legitimasi dalam mengelola pemerintahan. Sebab, bila pemimpin pemerintahan gagal memperbesar legitimasi, maka konsekuensinya kepercayaan masyarakat semakin melorot. Karena itu, ada keterkaitan antara kinerja buruk dengan legitimasi pemimpin yang sedang menurun. Misalnya, ketika kinerja pemerintahan menurun, maka kekecewaan publik menjadi nyata (Sultani, 2006).

B. MAKNA LEGITIMASI

Istilah legitimasi dalam kajian ilmu pemerintahan sangat mendasar untuk dipahami secara konseptual. Legitimasi dalam kajian ilmu pemerintahan tidak hanya dikaitkan dengan keberadaan pemimpin dalam arti apakah pemimpin memiliki legitimasi atau tidak memiliki legitimasi? Apakah warga negara memiliki komitmen dan penilaian atas kinerja pemerintahan ini dalam kaitannya untuk memahami pemilihan (Mujani, Liddle, Ambardi, 2011). Dalam konteks suksesi kepemimpinan misalnya, perolehan suara selalui pemilu yang demokratis dipahami sebagai bentuk dukungan masyarakat kepada pemimpin. Pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan legitimasi? Belling dan Totten (1980) mengartikan legitimasi:

Suatu kondisi penilaian, validitas, dan penerimaan secara positif yang dinikmati oleh pemimpin, baik secara individual maupun kelompok berdasarkan hukum atau sumber otoritas.

Legitimasi berdasarkan hukum itulah ujung akhir dari pendapat Belling dan Totten. Pendapat ini kurang lebih sama dengan Morries (2012), yang mengatakan legitimasi berarti sesuai dengan hukum atau diperbolehkan oleh hukum. Pendapat berbeda disampaikan Ramlan Surbakti dalam bukunya *Memahami Ilmu Politik*. Ramlan (2013) menulis legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat keputusan, dan melaksanakan keputusan. Dua definisi ini saling terkait ketika memahami legitimasi sebagai bentuk penerimaan dan penilaian secara hukum. Namun, Surbakti (2013) menambahkan dalam legitimasi terdapat pengakuan masyarakat kepada pemimpinnya. Pengakuan dari yang dipimpin kepada pemimpin diperlukan dalam membangun pola relasi kekuasaan. Sebagaimana dikatakan S Martin Lipset (2007) bahwa legitimasi mencakup kemampuan menghasilkan dan menjaga kepercayaan bahwa pemimpin yang ada paling cocok dengan masyarakat karena memiliki komitmen dalam membangun pemerintahan yang baik (Mujani, Liddle, Ambardi, 2011).

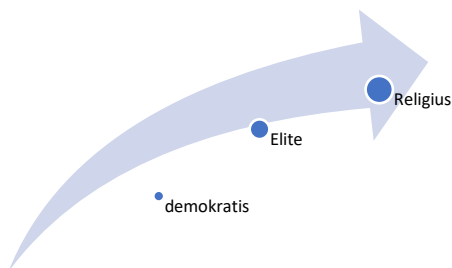
Kinerja yang baik merupakan cara pemimpin menjaga kepercayaan warganya. Karena itu, ada pendapat yang mengatakan legitimasi menyangkut soal kemampuan menciptakan kinerja yang dirasakan masyarakat (Belling dan Totten, 1980). Semakin bagus kinerja pemerintah semakin bagus penerimaan rakyat. Itulah yang membuat Morries berkata bahwa legitimasi sangat terkait dengan sikap rakyat (Morries, 2012) kepada pemerintah. Naik-turunnya sikap rakyat sangat

tergantung pada kinerjanya. Hal ini bisa kita baca melalui sejumlah jajak pendapat atau hasil survei. Misalnya, wartawan *Kompas*, Sultani (2006) menulis:

Dalam jajak pendapat kali ini, suara ketidakpuasan publik terhadap pemimpin kembali terekam dengan jelas. Ekspresi ketidakpuasan tersebut nampaknya bersumber dari gagalnya pemimpin memenuhi harapan publik dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi bangsa ini. Karena itu, wajar apabila lebih dari separuh yakni 58,6 responden menganggap pemimpin belum berhasil memperbaiki kondisi bangsa ini.

C. BENTUK LEGITIMASI PEMERINTAHAN

Formasi atau bentuk legitimasi cukup beragam. Saiful Mujani, R William Liddle, Kuskridho Ambardi (2011) mengaitkan legitimasi dengan hasil pemilu. Sedangkan, Edward Shills (1985) mengaitkan keahlian akan mendatangkan legitimasi bagi pemerintah. Selanjutnya, S Martin Lipset (2007) mencoba memahami legitimasi dalam kaitannya dengan efektifitas dalam mengelola pemerintahan. Franz Magnis Suseno mengaitkan legitimasi dengan kekuasaan. Suseno (2001) membagi tiga bentuk legitimasi—sebagaimana terlihat pada bagan 1.



Gambar 1. Peta jalan legitimasi Pemerintahan

Pertama, legitimasi demokratis sangat berhubungan dengan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat bersandar pada amanah kekuasaan yakni dari rakyat—oleh rakyat—untuk rakyat. Diktum ini bisa digunakan dengan memahami bagaimana pemerintah mengorientasikan kinerjanya semata-mata untuk rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Cara berpikir kedaulatan rakyat selalu berpijak pada kepentingan umum. *Kedua*, legitimasi elite berarti hanya sekelompok orang yang memiliki kecakapan dalam memerintah. Kecakapan ini berkorelasi dengan kemampuan dalam mengeksekusi pekerjaan secara efektif dan efisien. *Ketiga*, legitimasi religius berdasarkan hak untuk memerintah berdasarkan kekuatan ilahi dan adiduniawi.

Sedangkan dalam *Kamus Istilah Politik* karya Jahja Muhaimin dkk memetakan tiga bentuk legitimasi. *Pertama*, legitimasi karisma berdasarkan pada kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya. Dalam legitimasi karisma—masyarakat menerima pemimpinnya secara istimewa. *Kedua*, legitimasi sipil timbul dalam sistem pemerintahan yang berdasarkan pada persetujuan dari yang dipimpin karena disatukan tujuan dan kepentingan yang sama. *Ketiga*, legitimasi *numinous* yakni keabsahan pemimpin yang diperoleh karena adanya doktrin teologi yang menyatakan bahwa kekuasaan hanya sah dipegang oleh raja (Muhaimin dkk, 1987). Legitimasi ini memberikan keistimewaan kepada raja dalam memimpin. Meskipun demikian, kinerja seorang raja diharapkan berpihak kepada warganya. Bahasa ‘tahta untuk rakyat’ mencerminkan sikap politik seorang pemimpin pemerintahan dalam membela dan melayani warganya (Swantoro, 2007).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa ada enam bentuk legitimasi, yakni demokrasi—elite—religius—karisma—sipil—numinous atau ilahi. Enam bentuk legitimasi ini membuka pilihan bagi pemimpin untuk melaksanakan, baik secara menyeluruh maupun parsial. Sebab, apa pun pilihannya selalu bersandar pada kalkulasi politis, yakni soal penerimaan. Karena itu, kehati-hatian pemimpin diperlukan dalam menggerakkan roda pemerintahan. Mengingat semua tindakan dan kinerja pemerintahan merupakan tanggung jawab pemimpin (Suseno, 2001).

D. KINERJA MEMPERBESAR LEGITIMASI

Pemerintah semakin kuat

Idealnya kinerja yang baik akan menghasilkan pemimpin yang stabil dan kuat. Kestabilan pemerintahan tidak saja memungkinkan pelaksanaan pembangunan, tetapi juga akan memperkuat legitimasi pemerintahan. Dengan kata lain, kinerja yang baik akan memperkuat legitimasi pemerintahan. Adapun basis argumentasinya adalah *pertama*, semakin bagus kinerja pemerintahan dalam memberikan kesejahteraan material masyarakat seperti jaminan ketersediaan kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja semakin kuat penerimaan masyarakat terhadap pemerintah yang berkuasa (Surbakti, 2013).

Kedua, kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan konflik yang ada dalam masyarakat (Liddle, 2005). Kemampuan menyelesaikan konflik berarti ikut membantu warganya dengan memberikan rasa aman dan damai. Tidak hanya itu, kemampuan untuk menyelesaikan konflik

menunjukkan bahwa pemerintah memiliki pengaruh dan kekuasaan dalam mendamaikan aktor-aktor yang sedang berkonflik. Sebab, dengan menyelesaikan konflik berarti memberikan keuntungan bersama kepada masyarakat (Surbakti, 2013).

Ketiga, semakin bagus kinerja pemerintah secara otomatis tingkat popularitas dan penerimaan warga semakin baik. Pemerintahan yang berkinerja baik akan dikagumi karena jasanya yang mengagungkan dan memajukan warganya (Swantoro, 2007). Dengan kata lain, kinerja seorang pemimpin memiliki dampak positif kepada warganya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang baik telah mengangkat harkat, martabat dan kemanusiaan warganya.

Tiga poin di atas sudah cukup untuk mengatakan bahwa bahwa pemerintah semakin kuat manakala kinerjanya berbanding lurus dengan penerimaan rakyat. Dengan kinerja yang baik, maka stabilitas kekuasaan semakin mantap. Salah satu tujuan dari pemimpin adalah memperkuat dan mempertahankan kekuasaan. Mekanisme untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaan melalui kinerja. Dalam istilah P. Swantoro (2007): kinerja yang sukseslah yang bisa mengantarkan pemimpin untuk tetap berkuasa selama dua periode.

Dukungan masyarakat

Sepintas telah dijelaskan soal pemimpin yang kuat. Pemimpin yang kuat yang dimaksud adalah yang memiliki kapasitas dalam menggerakkan birokrasi secara efektif dan mampu mengelola kekuasaan untuk kepentingan warganya. Itu artinya semua sumber daya pemerintah akan digerakkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Jenis pemimpin ini sudah

tentu mendapatkan dukungan dari warganya. Ada dua bentuk dukungan yang dibutuhkan pemimpin pemerintahan. *Pertama*, dukungan politik dari warganya manakala maju dalam berkompetisi memperebutkan jabatan politik. Pemimpin yang bekerja nyata dan dirasakan manfaatnya secara akal sehat perlu mendapatkan dukungan politik. Dalam pemilu yang dilaksanakan bebas dan demokratis—para kandidat bebas bersaing untuk menarik dukungan dan perhatian pemilih. Namun, yang akan terpilih dalam pemilu adalah pemimpin yang bekerja dan memiliki rekam jejak. *Kedua*, dukungan diperlukan ketika implementasi program. Program kerja pemerintah perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat. Keberhasilan program kerja pemerintahan sangat ditentukan keterlibatan banyak pihak. Kemampuan berkolaborasi antaraktor akan meringankan pekerjaan pemerintah. Sejalan dengan itu, keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan sangat diperlukan dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, kesuksesan kinerja pemerintahan akan menghasilkan kepuasan batin, tetapi juga membuka berbagai macam kemungkinan (Swantoro, 2007).

Ketiga, dukungan dari masyarakat dibutuhkan dalam bentuk suara kritis terhadap semua tindakan dan kinerja pemerintah. Mengkritik kinerja pemerintahan harus dipahami sebagai bentuk memberikan dukungan kepada pemimpin pemerintahan. Kritik itu bagian penting dalam mengelola pemerintahan. Kritik diperlukan agar pemimpin pemerintahan mencurahkan segenap pikiran dan kerjanya untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, kritik juga perlu untuk mendewasakan pemimpin pemerintah. Sebagaimana dikatakan Liddle (2005), dalam masyarakat demokratis, kritik, dan perbedaan pendapat merupakan sebuah kewajaran.

Jadi, dukungan masyarakat kepada pemerintah berwajah ganda. Bisa dalam bentuk ikut berpartisipasi ataupun memberikan suara kritis atas segala tindakan maupun kinerja pemimpin dalam mengelola pemerintahan. Dua-duanya sah. Karena bisa bermakna memberikan dukungan kepada pemerintah. Semakin baik kinerja pemerintah, semakin kuat komitmen warga dalam memberikan dukungan. Sebaliknya, semakin tidak bagus kinerja pemimpin (Mujani, Liddle, Ambardi, 2011), semakin menurun popularitasnya dan berakhir dengan kekecewaan kepada pemerintahan (Liddle, 2005).

Mempercayai pemerintah

Dalam rangka memperkuat legitimasi pemimpin pemerintahan, maka butuh kepercayaan. Kepercayaan adalah harapan-harapan terhadap keteraturan, kejujuran, perilaku kerjasama yang muncul dalam relasi pemimpin dan yang dipimpin dalam komunitas politik (Fukuyama, 2010). Karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya sangat mendasar. Bahkan, pemimpin Jepang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari warganya (Fukuyama, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin tersebut, tidak hanya memiliki legitimasi politik yang kuat, tetapi dengan kepercayaan masyarakat yang tinggi bisa menghasilkan dua hal. *Pertama*, kepatuhan masyarakat kepada pemimpin (Belling dan Totten, 1980). Kepatuhan merupakan bentuk pengakuan masyarakat kepada pemimpinnya. Kepatuhan bisa diciptakan melalui kerangka legal formal. Bisa juga karena karisma seorang pemimpin. Kerangka legal formal maupun karisma membuat masyarakat patuh dan mengagumi pemimpinnya.

Kedua, kepercayaan merupakan modal politik pemimpin dalam mengelola pemerintahan. Kinerja yang baik adalah bagian dari modal politik pemimpin pemerintahan. Pemahaman ini lahir karena kita percaya kepada pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahannya dengan bersandar pada norma-norma profesionalisme dan aturan konstitusi (Fukuyama, 2010). Kita juga yakin bahwa pemimpin pemerintahan akan serius bekerja untuk rakyatnya.

Hal ini nampak usaha pemerintah yang semakin sering rapat dan mendiskusikan urusan rakyatnya tanpa mengenal waktu, tempat, dan jarak, sehingga intensitas rapat yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah bekerja serius untuk rakyatnya. Karena itu, berbagai instansi pemerintah berlomba-lomba membuat layanan masyarakat dengan mengekspos apa yang telah dikerjakan buat rakyat. Ini mengisyaratkan bahwa pemimpin pemerintah bertanggungjawab dan berpihak pada rakyat dan masa depan bangsa (Haris, 2014).

Dengan kata lain, apa pun yang dilakukan oleh pemerintah semata-mata demi rakyatnya. Implikasinya adalah masyarakat semakin percaya. Jika, hal ini sudah tercapai, maka pemimpin pemerintahan akan mendapatkan pengakuan. Pengakuan diperlukan sebagai upaya untuk menaikkan martabat dan harkatnya. Sebab, pemimpin lebih puas apabila mendapatkan pengakuan status dari warganya (Liddle, 2005).

E. KINERJA BURUK, LEGITIMASI MENURUN

Mosi tidak percaya

Mosi tidak percaya muncul dalam disuarakan oleh masyarakat agar mendapatkan perhatian pemimpin. Gerakan mosi tidak percaya muncul karena kinerja pemerintah, baik dalam bidang ekonomi—hukum—dan keamanan menurun. Sebagai ilustrasi, tingginya tingkat kriminalitas akan berdampak pada keresahan masyarakat. Bila pemimpin pemerintahan tidak mampu memberikan rasa aman kepada warganya, maka secara otomatis penilaian masyarakat atas kinerja dalam bidang keamanan menurun. Tentu, tidak hanya dalam bidang keamanan tetapi di semua bidang kehidupan. Lihat Jajak Pendapat *Kompas*:

Contoh pada usia 18 bulan pemerintahan SBY, keyakinan masyarakat meredup terhadap kemampuan pemerintah memperbaiki kondisi politik—hukum—ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Suryaningtyas, 2006).

Ulasan ini memperjelas ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pemerintah yang mereka pilih melalui mekanisme demokrasi ternyata tidak mampu memberikan perubahan. Keadaan ekonomi yang belum pulih dan rasa keamanan yang mereka perlukan. Misalnya, lima tahun mendukung dan sangat antusias atas kepemimpinan Megawati dan PDIP. Masyarakat berharap Megawati dan PDIP akan menciptakan sebuah pemerintahan yang demokratis, bebas KKN, dan peduli terhadap keperluan dan kepentingan mereka. Namun apa yang terjadi, mereka kecewa dengan pemerintahan (Liddle, 2005) yang tidak bisa berbuat banyak.

Dengan kata lain, kekecewaan muncul karena kinerja pemerintah yang kurang memuaskan. Sedangkan Fukuyama (2010) menyebut fenomena ini sebagai masyarakat yang berkepercayaan rendah (*low-trust*) terhadap pemerintah. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka pemimpin akan goyah dan ketidakefisienan dalam mengelola pemerintahan akan berdampak pada menurunnya legitimasi (Belling dan Totten, 1980).

Pemerintah lemah

Legitimasi yang merosot menjadi petanda pemerintah yang lemah. Dalam pemerintah yang lemah tidak akan mampu memobilisasi sumber dayanya untuk kemajuan dan kesejahteraan warganya. Pemerintah yang lemah juga ditunjukkan dengan membiarkan orang-orang disekitarnya ‘pertarungan besar’ secara tidak sehat dan tidak produktif karena mendahulukan kepentingan diri dan golongan daripada kepentingan public (Piliang, 2008). Tidak hanya, kinerja pemimpin juga menurun karena tidak ditopang dengan birokrasi yang lincah. Renald Kasali (2007) menulis:

Masalah yang dihadapi pemimpin sekarang adalah mesin birokрасinya sudah terlalu tua dan lama, sehingga lambat bergerak dalam mengerjakan keputusan yang dibuat pemerintah. Akibatnya adalah masyarakat tidak puas atas kinerja pemerintah dianggap tidak pro rakyat.

Pendapat lain mengatakan bahwa masyarakat seharusnya tidak berharap banyak dengan pemimpin. Sebab, pemimpin tidak bisa bertindak tegas, kongkrit, dan dirasakan oleh masyarakat (Kristiadi, 2007). Selanjutnya, ada kecenderungan

pemimpin untuk memberhalakan ‘prosedur’ dan ‘petunjuk’ yang menjerumuskan mereka ke dalam lembah kejumudan (Dwiyanto, 2012). Kalau demikian penjelasannya, maka kinerja pemimpin tidak efektif dan efisien. Akibatnya adalah muncul keresahan dalam masyarakat. Bila hal ini dibiarkan akan berujung pada krisis legitimasi.

Krisis legitimasi

Krisis legitimasi merupakan salah satu poin penting dalam tulisan Liddle (2005). Hanya saja, Liddle memahami krisis legitimasi dalam konteks pemerintahan otoriter. Sedangkan pendapat lain mengatakan krisis legitimasi biasanya terjadi pada masa transisi. Maksudnya, perubahan dari masyarakat tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat modern yang berstruktur kompleks (Surbakti, 2013). Dua penjelasan ini tentu ada benarnya. Hanya saja krisis legitimasi yang mereka pahami tidak dikaitkan dengan menurunnya kinerja pemerintahan.

Buruknya kinerja pemerintahan akan berdampak pada krisis legitimasi. Krisis legitimasi ini akan menimbulkan. *Pertama*, berpotensi membahayakan keberlangsungan pemerintahan demokratis (Liddle, 2005). Dikatakan demikian, karena pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap eksistensi pemerintah semakin menurun. Jika hal ini terjadi, maka pemimpin pemerintahan akan kehilangan legitimasinya.

Kedua, akan terjadi frustrasi dan keresahan dalam masyarakat (Belling dan Totten, 1980) sebagai konsekuensi dari merosotnya kinerja pemerintahan. Frustrasi dan keresahan bisa menjadi pemicu terjadi gelombang perlawanan kepada pemerintahan. Sebagai contoh krisis ekonomi tahun 1997-1998 membuat semua elemen bangsa bergerak dan menuntut agar

pemimpin Soeharto turun dari kekuasaan. Tuntutan ini berhasil diwujudkan. Soeharto turun tahta dan kemudian diganti BJ Habibie.

Ketiga, pemimpin pemerintahan tidak mampu memenuhi janjinya sehingga menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat. Kekecewaan berakibat pada mudarnya dukungan masyarakat kepada pemerintahan (Surbakti, 2013). Ketika pemimpin kehilangan dukungan politiknya, maka pada suksesi kepemimpinan selanjutnya masyarakat akan memilih figur lain yang benar-benar peduli dengan kebutuhan dan kepentingan mereka (Liddle, 2005). Pemimpinnya mereka pilih diharapkan bertanggungjawab dalam menjalankan kekuasaannya untuk rakyat.

Terakhir, krisis partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam tatakelola pemerintahan (Belling dan Totten, 1980). Krisis partisipasi berarti masyarakat memiliki tingkat ketidakpercayaan kepada pemerintah menurun. Kealpaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan mengisyaratkan bahaya demokrasi. Mengapa? Karena partisipasi warga negara adalah jantung demokrasi. Bahkan, demokrasi tidak bisa dibayangkan tanpa kemampuan warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan (Belling dan Totten, 1980).

Hal ini menjelaskan betapa pentingnya keterlibatan warga negara dalam pemerintahan. Ketika warga negara menarik diri dari proses politik, maka pemerintahan yang ada mengalami kecacatan dalam demokrasi. Logikanya adalah keabsahan pemerintahan kemudian dipertanyakan. Pada titik inilah suara suksesi kepemimpinan, yakni mengganti pemimpin lama dan memunculkan pemimpin baru (Belling dan Totten, 1980) menjadi sebuah keharusan.

F. CATATAN KRITIS

Kinerja sebagai sumber legitimasi tentu tidak bisa diragukan lagi. Karena itu pemimpin pemerintahan harus memiliki birokrasi handal, yang memiliki kapasitas teknokratik dalam memecahkan persoalan yang kompleks dalam masyarakat secara bertanggungjawab (Suseno, 2001). Sedangkan, Kasali (2007) mengatakan

Pemimpin harus membangun timnya, termasuk organisasi pemerintahan agar keputusan yang diambil bergerak responsif, merembes ke bawah dengan mesin-mesinnya yang siap kerja demi masyarakat.

Kerjasama dan kemampuan menggerakkan mesin pemerintahan memerlukan pemimpin yang kuat. Hanya dengan pemimpin kuat dan memiliki komitmen segala keperluan dan kepentingan masyarakat bisa diwujudkan. Merujukkan kepentingan masyarakat merupakan pekerjaan seorang pemimpin. Dengan keberhasilan ataupun kegagalan dalam menciptakan kinerja semua akan dinilai oleh penerima manfaat yakni rakyat. Bila kinerja pemerintah bagus, maka legitimasinya akan mendatangkan kestabilan politik (Surbakti, 2013). Sebaliknya, bila kinerja pemerintah gagal, maka kekecewaan dan destruksi sebagai imbalannya. Sedangkan Fukuyama (2010) mengatakan kinerja pemerintahan yang bagus akan menciptakan kepercayaan tinggi sedangkan jika pemimpin berkinerja gagal akan memunculkan ketidakpercayaan yang tersebar-luas dalam suatu masyarakat. Dua tarikan inilah yang menemani pemimpin dalam bekerja dan memperoleh legitimasi politik dalam mengelola pemerintahan yang kuat, stabil, dan bertanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Badudu, JS. (2009). *Kamus Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Belling dan Totten. (1980). *Modernisasi Masalah Model Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dwiyanto, Agus. (2011). *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Gramedia.
- Fukuyama, Francis. (2010). *Trust: Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Jogjakarta: Qalam.
- Haris, Syamsuddin. (2014). *Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi* Jakarta: YOI.
- Kasali, Renald. (2007). 'Presiden Sudah Bekerja'. *Kompas*, 19 Januari.
- Kompas, 21 Juni 2021.
- Kristiadi, J. (2007). 'Harap Cemas Presiden Bertindak Tegas'. *Kompas*, 3 Januari.
- Liddle, R William. (2005). *Revolusi Dari Luar: Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Freedom Institute.
- Lipset, S. Martin. (2007). *Political Man: Basis Sosial tentang Politik*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Magnis-Suseno, Franz. (2001). *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Magnis-Suseno, Franz. (2001). *Kuasa dan Moral*. Jakarta: Gramedia.
- Morris, Christopher W. (2012). 'Negara Modern' dalam Gerald F Gaus dan Chandran Kukathas (ed). *Handbook Teori Politik*. Bandung: Nusa Media.
- Muhaimin, dkk, Jahja. (1987). *Kamus Istilah Politik*. Jakarta: Mendikbud.

- Mujani, Saiful, R William Liddle, Kuskridho Ambardi. (2011). *Kuasa Rakyat*. Bandung: Mizan.
- Piliang, Yasraf Amir. (2008). 'Fragmentasi Kekuasaan', *Kompas*, 2 Januari.
- Shills, Edward. (1985). 'Kaum Intelektual dalam Pembangunan Negara Baru' dalam Sahat Simamora (ed). *Pembangunan Politik dalam Perspektif*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sultani. (2006). 'Citra Kabinet Tergerus'. *Kompas*, 7 Agustus.
- Surbakti, Ramlan. (2013). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Suryaningtyas, Toto. (2006). '18 Bulan Pemerintahan, Keyakinan Meredup' *Kompas*. 17 April.
- Swantoro, P. (2007). *Masa Lalu Selalu Aktual*. Jakarta: Kompas.

PROFIL PENULIS DAN EDITOR

Ainur Rofieq, S.I.P., M.I.P.



Lahir di Jakarta, 30 Juli 1975 dan besar di Kudus. Menempuh pendidikan sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fisipol UGM dan menempuh pendidikan master pada Program Studi Ilmu Politik, FISIP UI. Saat ini bekerja sebagai dosen tetap Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi.

Aktif dalam berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta menulis jurnal dan buku. Bisa dihubungi melalui e-mail: ainur.rofieq75@gmail.com

Dr. Andi Sopandi, S.S., M.Si.



Lahir di Bekasi, 21 Pebruari 1972, menempuh Pendidikan S1 di Universitas Padjadjaran, S2 Program Studi Sosiologi, Konsentrasi Manajemen Pembangunan Sosial di Universitas Indonesia, 2003, melanjutkan S3 Sosiologi di Universitas Padjajaran.

Menjadi konsultan selama 15 tahun di Kementerian Sosial RI, Kemendagri, konsultan berkaitan dengan Community Development, perencanaan wilayah, kajian Sosial-Budaya-Sejarah. Saat ini menjadi Ketua 1 Dewan Pendidikan Kota Bekasi, Tim Ahli Cagar Budaya. Beberapa karya adalah Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Industri, Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan karakteristik wilayah di Kementerian Sosial RI, Peranan PMPP dalam Kontingan Garuda PBB (Mabes-TNI), 66 Tahun MPR RI (Sekjen MPR-RI), Peran PT PAL dalam Pengembangan Alustista Laut Indonesia (PT PAL-Indonesia).

Dr. M. Harun Alrasyid, Drs., M.Si.



Merampungkan pendidikan sarjana pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran, pendidikan magister di Program Studi Ilmu Politik, Universitas Indonesia, serta pendidikan doktor bidang Manajemen Lingkungan di Universitas Negeri Jakarta.

Dosen tetap Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP dan Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Islam 45. Saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama. Sebagai praktisi berpengalaman di bidang manajemen pemerintahan dan environmental strategic management di berbagai sektor, termasuk di pemerintahan, industri, dan lembaga nirlaba. Pengalaman yang dimiliki di luar akademik sebagai Anggota Dewan Pengawas PDAM Tirta Bhagasasi, Ketua Dewan Transportasi Kota Bekasi, Ketua Komisi Tata Kelola Dewan Kota Cerdas Kota Bekasi, Ketua Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direksi PDAM Tirta Bhagasasi, dan Ketua Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direksi dan Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tirta Bhagasasi. Selain itu menjadi tenaga ahli JICA dalam Program IWRM Sarbagitaku Bali, team leader Program Clean Development Mechanism World Bank, Advisory Management Kawasan Industri Jababeka, tenaga ahli Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, koordinator Social Engagement “Waste to Energy” Danida Denmark, dan Anggota Tim Percepatan Perencanaan Daerah Kabupaten Bekasi. Bisa dihubungi melalui e-mail: maharuna13@gmail.com.

Dr. Muhtar Haboddin, S.I.P., M.A.



Muhtar Haboddin adalah Dosen Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Brawijaya. Aktif menulis jurnal dan buku. Karya terakhir Pilkada Serentak Jawa Timur (2023) dan Kepemimpinan Pemerintahan (2022) Inovasi Pemerintahan Kontemporer (2022) Aktor Politik dalam Kampanye (2021).

Minat Kajiannya: Elite politik, Kepemimpinan dan Inovasi pemerintahan.

Bisa dihubungi: muhtar_haboddin@ub.ac.id.

Hartanto Rosojati, S.Sos., M.Si.



Hartanto Rosojati adalah peneliti di Populi Center. Menamatkan pendidikan sarjana di Universitas Gadjah mada (UGM) pada bidang Ilmu Sosiologi (2005) dan magister di Universitas Indonesia pada bidang Ilmu Antropologi (2022).

Sering terlibat dalam beberapa proyek riset, baik secara individu atau bekerjasama dengan kementerian/lembaga seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian PPPA, dan beberapa lainnya. Telah menerbitkan beberapa jurnal ilmiah dan buku. Ketertarikan risetnya terletak pada persoalan development studies, masyarakat adat, komunitas marginal, politik, lingkungan, dan budaya. Tema pada tulisan kali ini seputar lingkungan yang secara faktual mengulas terjadinya perubahan iklim dan relevansinya terhadap masa depan politik di Indonesia.

Susi Dian Rahayu



Susi Dian Rahayu, lahir di Musi Banyuasin, pada 26 Juli. Saat ini ia tercatat sebagai salah satu pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam 45, Bekasi serta staf Ahli di Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia (DPD RI). Pendidikan S1 nya ia tempuh di Universitas Diponegoro, Semarang jurusan Ilmu Pemerintahan. Sedangkan pendidikan S2 nya ia tempuh di Universitas Indonesia (UI) jurusan Ilmu Politik. Sejak duduk di bangku S1, ia aktif diberbagai kegiatan, baik itu organisasi maupun kegiatan riset/ studi lapangan. Berbagai karya ilmiah telah ia tuliskan baik nasional maupun internasional. Diantaranya Urgency of Independency and Neutrality of Election Organizer in Local Election 2017 (IIFAS, Indonesian Forum for Asian Studies), Comparative of Voting Behaviour in Elite and Slum Areas at Local Election of DKI Jakarta 2017 yang dipresentasikan pada Oktober 2017 di Istanbul, Turki. Analysis Conflict of United Development Party (PPP) at Local Election of Central Kalimantan at 2015 yang dipresentasikan di Kasetsart University, Thailand dan berhasil meraih penghargaan: Global Research Scholarship Award”.

ISLAM DAN PEMERINTAHAN KONTEMPORER

Refleksi Akademik Kajian KURMA

Buku ini merupakan kumpulan tulisan hasil diskusi dan kajian yang diselenggarakan oleh Laboratorium Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam 45 Bekasi dalam kegiatan KURMA (**K**ajian **B**ulan **R**amadhan **I**slam dan **P**emerintahan). Kegiatan ini bertujuan memberikan wawasan tentang hubungan antara Islam, pemerintahan, dan politik kontemporer, dengan tema-tema yang beragam mulai dari kepemimpinan, peran ulama, sistem politik Islam, hingga isu lingkungan dan pendidikan politik menjelang Pemilu 2024.

Tulisan dalam buku ini berasal dari narasumber KURMA yang membahas berbagai aspek pemerintahan dan Islam, serta tulisan yang berasal dari para kontributor yang tertarik mengembangkan pemikiran terkait tema KURMA.

Melalui buku ini, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam 45 menunjukkan komitmennya dalam memberikan kontribusi intelektual yang relevan bagi masyarakat, khususnya dalam memahami dinamika politik dan pemerintahan dari perspektif Islam. Buku ini juga menjadi dokumentasi penting yang merekam perjalanan diskusi dan pemikiran kritis selama empat tahun pelaksanaan KURMA.



PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 5751 7526 / 0353 3234 874
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta

@penerbitbukujogja

@penerbit.kbm

ISBN 978-634-278-253-8

